

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Indonesia terutama di DKI Jakarta merupakan salah satu momentum politik yang sangat penting dan memiliki arti strategis dalam dinamika politik Indonesia. DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial menjadikan pemilihan kepala daerah di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan lokal, tetapi juga memperoleh perhatian secara nasional. Pilkada ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi refleksi dari perubahan sosial dan segala aspek dari kebutuhan masyarakat. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, isu pemerataan sosial, pelayanan publik, transparansi pemerintahan, pembangunan perkotaan, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam kontestasi antar pasangan calon. Menjelang Pilkada 2024, kondisi politik di DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Ditandai dengan banyaknya tokoh yang digadang sebagai kandidat pasangan calon yang bermunculan, riwayat persaingan antara kandidat yang dinilai akan semakin ketat, serta adanya isu-isu kontemporer yang diangkat sehingga menjadi semakin beragam.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

untuk pemilihan umum di DKI Jakarta mencapai 8.214.007 orang. Jumlah ini mencakup 4.048.811 pemilih laki-laki dan 4.165.196 pemilih perempuan yang tersebar di 14.835 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 267 kelurahan, dan 44 kecamatan di enam kabupaten/kota DKI Jakarta. Wilayah dengan jumlah pemilih terbesar adalah Jakarta Timur dengan 2.374.828 pemilih, diikuti oleh Jakarta Barat sebanyak 1.909.774 pemilih, dan Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih, lalu Jakarta Utara sebanyak 1.345.815 pemilih, serta Jakarta Pusat sebanyak 813.721 pemilih. Sementara itu, Kepulauan Seribu memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terendah dalam Pilkada 2024 ini yakni hanya 20.908 pemilih (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2024). Dari jumlah 8,2 juta pemilih ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Kandidat pasangan calon yang menang dalam Pilkada tidak hanya diberi mandat untuk memahami isu-isu lokal saja, tetapi juga diharapkan mampu untuk menjangkau segmen-segmen masyarakat yang beragam, termasuk kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 11.010.514 jiwa, yang terdiri atas 5.521.290 penduduk laki-laki dan 5.489.224 penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, penduduk perempuan mencakup sekitar 49,85% dari keseluruhan populasi DKI Jakarta. (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025). Proporsi Perempuan yang hampir mencapai separuh jumlah penduduk tersebut menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam mengubah jalannya kemenangan dalam pemilu. Dengan mengusung isu yang relevan dan

mendengarkan aspirasi dari pemilih perempuan, kandidat pasangan calon dapat meningkatkan peluang mereka untuk menang. Namun, partisipasi perempuan dalam proses politik juga seringkali menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat keterlibatan mereka di ranah publik. Salah satu hambatan utamanya adalah stereotip gender yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam keseharian masyarakat masih ditemukan mereka yang berpegang pada pandangan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai pengasuh anak dan pengurus rumah tangga. Sementara laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah dan pembuat keputusan. Seiring berjalannya waktu, pembagian peran ini menciptakan stigma negatif terhadap perempuan di ruang publik termasuk pada perempuan yang ingin terlibat dalam kontestasi politik namun terhambat karena sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berakar dalam budaya patriarki.

Berbagai kajian tentang partisipasi perempuan dalam politik Indonesia menunjukkan bahwa tekanan sosial dari lingkungan sekitar menjadi salah satu hambatan signifikan bagi keterlibatan perempuan di ranah publik. Norma-norma sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik kerap menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin aktif berpolitik (Klerista & Subandi, 2025). Kekerasan berbasis gender juga menjadi masalah serius yang menghalangi perempuan dari partisipasi aktif dalam politik. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat 289.111 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender. Angka tersebut merupakan kompilasi laporan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan, badan peradilan, dan institusi terkait

lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membatasi rasa aman dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Meskipun data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam ranah personal, keberadaan kasus di ranah publik dan negara tetap memperlihatkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2024).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan politik menjadi salah satu hambatan yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi perempuan. Pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik, kemampuan membaca isu publik, keberanian menyampaikan aspirasi, serta kesiapan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Rahmah (2021) menjelaskan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keberanian perempuan untuk menjalankan hak-hak politiknya. Oleh karena itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik dapat menghambat perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara lebih aktif di ranah politik. Resistensi masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan tradisional mengenai pembagian peran gender. Anggapan bahwa politik merupakan ranah laki-laki, sedangkan perempuan lebih tepat ditempatkan dalam ranah domestik, dapat membatasi penerimaan sosial dan kesempatan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik (Sahira et al., 2025). Sebagian masyarakat percaya bahwa

sampai saat tertentu, peran utama perempuan seharusnya berada di rumah dan hanya mendukung peran suami sebagai pemimpin.

Resistensi ini berakar dari ketidakpahaman terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang justru dapat memengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa diri mereka tidak berdaya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik atau aktivitas sosial yang lebih luas. Selain itu, norma-norma sosial yang tertanam kuat sering kali menciptakan hambatan yang membuat perempuan sulit untuk mengakses pendidikan dan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hal ini sangat berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik, terutama sebagai calon anggota yang berimplikasi pada tidak terwakilinya suara perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.

Perubahan sosial akibat gerakan feminisme dan kesetaraan gender telah mendorong berkembangnya pandangan positif terhadap partisipasi perempuan di ranah politik. Gerakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan, tidak hanya dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam politik. Melalui kampanye pendidikan, advokasi, dan partisipasi dalam organisasi, feminisme mendorong pemikiran bahwa suara perempuan adalah setara dan memiliki kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan gerakan kesetaraan gender dan penerapan kebijakan afirmatif telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk memasuki arena politik. Dalam sistem pemilu Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kebijakan afirmatif antara lain diwujudkan

melalui ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Kebijakan tersebut tidak secara otomatis menjamin keterpilihan perempuan, tetapi memberikan dasar kelembagaan untuk memperluas akses perempuan dalam proses pencalonan dan kompetisi politik. Dengan meningkatnya dukungan untuk gerakan ini, perempuan diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam politik, sejajar dengan rekan laki-laki mereka, dan membawa perspektif yang lebih beragam dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan perempuan kerap menjadi kelompok yang diperebutkan oleh berbagai pasangan calon karena mereka mencakup proporsi yang besar dalam DPT. Preferensi perempuan dalam pemilihan kepala daerah tidak semata-mata ditentukan oleh identitas gender, tetapi terbentuk melalui interaksi berbagai faktor sosial, psikologis, dan rasional. Perilaku pemilih perempuan pada Pilkada menunjukkan bahwa perempuan mempertimbangkan latar belakang sosial dan agama, kedekatan emosional dengan figur kandidat, rekam jejak, kualitas personal, serta visi dan misi kandidat dalam menentukan pilihan politiknya. Akses terhadap informasi, tingkat pendidikan, keluarga, media, dan lingkungan sosial juga turut membentuk orientasi politik perempuan (Bangun & Belda, 2021). Hal ini menunjukkan potensi besar bagi pasangan calon di masa pemilihan jika mereka mampu menjangkau dan meningkatkan keterlibatan pemilih perempuan dalam kampanye mereka.

Goyal (2024) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik dapat mendorong partisipasi politik perempuan melalui perekrutan perempuan sebagai aktivis partai di tingkat akar rumput. Politisi perempuan cenderung lebih mampu menjangkau dan merekrut aktivis perempuan, yang selanjutnya berperan dalam menyampaikan informasi, melakukan pendekatan kepada masyarakat, serta memobilisasi pemilih perempuan secara lebih merata. Ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima pesan politik, tetapi juga dapat berperan sebagai penghubung antara kandidat, jaringan partai, komunitas, dan pemilih di tingkat akar rumput.

Temuan ini relevan dengan konteks Pilkada di DKI Jakarta tahun 2024, ketika pasangan Pramono Anung–Rano Karno memasukkan pemberdayaan perempuan ke dalam sejumlah program kampanye. Salah satu bentuk konkretnya adalah komitmen untuk memfokuskan dana hibah sebesar Rp300 miliar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh perempuan (Nurhaliza, 2024) setara dengan sekitar 0,37% dari total APBD DKI Jakarta 2024 yang sebesar Rp81,72 triliun. Program tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai kelompok pemilih, tetapi juga sebagai kelompok sosial-ekonomi yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam agenda kebijakan pasangan calon. Pengalaman perempuan dalam menghadapi persoalan pekerjaan, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan akses terhadap pelayanan publik dapat menghadirkan sudut pandang yang belum tentu terwakili secara memadai dalam struktur politik yang didominasi oleh laki-laki. Sejumlah kajian menunjukkan

bahwa negara dengan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam pemerintahan, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas sehingga keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan dinilai penting karena dapat memperluas perspektif yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

Melihat pada data *Global Gender Gap Report 2021*, kesenjangan gender diukur melalui empat dimensi utama, yaitu partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pada dimensi pemberdayaan politik masih menjadi salah satu kesenjangan gender terbesar secara global. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi agenda penting dalam mewujudkan kesetaraan gender secara lebih menyeluruh (World Economic Forum, 2021). Di Indonesia, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan politik masih menghadapi keterbatasan, baik secara jumlah maupun dalam akses terhadap posisi pengambilan keputusan strategis. Meskipun demikian, keberadaan perempuan sebagai menteri, anggota legislatif, dan pejabat publik tetap penting karena berpotensi memperluas perspektif yang dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Pada tingkat lokal seperti di DKI Jakarta, perhatian terhadap kepentingan perempuan tercermin dalam sejumlah agenda kebijakan daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memuat program

pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan kapasitas lembaga pelayanan korban, serta pelayanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. Dokumen tersebut juga mencantumkan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok masyarakat (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, 2023). Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan kapasitas lembaga pelayanan korban, dan kesehatan reproduksi telah menjadi bagian dari agenda kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan salah satu dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pramono Anung memiliki pengalaman sebagai anggota dan pimpinan DPR RI serta pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, sedangkan Rano Karno memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif, Wakil Gubernur Banten, dan Gubernur Banten. Berdasarkan dokumen visi, misi, dan program yang disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, agenda pembangunan pasangan tersebut secara substantif mencakup pembangunan manusia, penguatan ekonomi dan UMKM, pembangunan perkotaan dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2024). Meski isu perempuan tidak dirumuskan sebagai pilar tersendiri, secara substantif tersebar dalam program Jakarta Berkeadilan serta Jakarta Bugar dan Produktif yang menyentuh kebutuhan perempuan secara signifikan.

Menyadari bahwa perempuan merupakan kekuatan besar dalam menentukan kemenangan pasangan calon dalam pemilu, pasangan calon ini berkomitmen untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap program yang diusung. Dalam kampanyenya, pasangan Pramono Anung–Rano Karno menempatkan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pendekatan politik yang dijalankan. Pendekatan tersebut sejalan dengan misi pasangan calon untuk mewujudkan pengelolaan kota yang modern, akuntabel, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang prima (KPU Provinsi DKI Jakarta, 2024). Orientasi pemerintahan yang responsif tersebut memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasinya. Dengan demikian, perempuan dalam *platform* pasangan calon dapat dipahami sebagai bagian dari warga Jakarta yang kepentingannya perlu diakomodasi melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.

Keterlibatan perempuan dalam kemenangan pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno mencerminkan dinamika pemilih yang kompleks. Dalam proses kemenangan pasangan calon, perempuan berpotensi menjalankan peran yang lebih luas daripada sekadar memberikan suara. Perempuan dapat terlibat sebagai relawan, penyebar informasi politik, pengorganisasi kegiatan, penghubung komunitas, dan pelaksana mobilisasi secara langsung yang memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan dan menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pemilihan yang akan datang. Jaringan sosial pada tingkat RT/RW, PKK, pengajian, arisan, serta komunitas lokal memainkan peran

penting dalam membangun relasi strategis dengan calon dan pemilih karena pengalaman komunitas dan hubungan sosial sangat berpengaruh. Perempuan yang aktif dalam jaringan sosial dapat menjadi penghubung yang efektif antara pasangan calon dengan basis pemilih. Mereka sering kali menjadi jembatan komunikasi, membantu membagikan visi dan misi pasangan calon kepada anggota komunitas, serta merespons kekhawatiran dan harapan masyarakat. Dengan demikian, perempuan menjadi katalisator yang dapat mengubah politisasi menjadi aksi nyata. Namun, keterlibatan perempuan dalam politik tidak dibebaskan dari berbagai tantangan. Hambatan seperti stereotip gender dan norma sosial menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam proses politik. Misalnya, ada kecenderungan di masyarakat untuk menganggap perempuan kurang mampu berkontribusi secara politik dibandingkan dengan laki-laki, yang dapat memperkecil kepercayaan diri mereka untuk terlibat. Untuk itu, penting bagi organisasi politik dan calon untuk memberikan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan tentang komunikasi politik, strategi kampanye, dan pengorganisasian komunitas, yang memungkinkan perempuan berfungsi efektif sebagai penggerak atau mobilisator pemilih.

Selain faktor motivasi dan jaringan sosial, ketersediaan sumber daya juga dapat memengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik. Aktivitas kampanye membutuhkan dukungan berupa waktu, akses transportasi, materi komunikasi, sarana koordinasi, serta kemampuan dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Keterbatasan terhadap sumber daya tersebut

dapat membatasi intensitas dan ruang gerak perempuan, terutama bagi mereka yang juga memiliki tanggung jawab domestik dan pekerjaan. Oleh karena itu, dukungan organisasi dalam bentuk pembagian tugas yang jelas, penyediaan sarana kampanye, pelatihan komunikasi politik, dan penguatan kapasitas relawan menjadi penting agar perempuan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam proses mobilisasi politik. Namun, bentuk dan distribusi dukungan tersebut perlu dianalisis berdasarkan temuan penelitian agar tidak hanya dipahami sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kapasitas politik perempuan.

Menegaskan pentingnya penelitian ini, perempuan memiliki posisi strategis dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, baik sebagai kelompok pemilih maupun sebagai aktor yang berpotensi terlibat dalam proses mobilisasi politik. Namun, besarnya jumlah pemilih perempuan belum menjelaskan bagaimana keterlibatan tersebut terbentuk, bentuk-bentuk partisipasi yang dijalankan, faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta perbedaan peran perempuan dalam struktur strategis, penggerak lapangan, dan basis dukungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis proses dan bentuk partisipasi perempuan dalam kemenangan pasangan Pramono Anung–Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran jaringan sosial, keluarga, motivasi individu, serta strategi mobilisasi dalam membentuk keterlibatan politik perempuan.

Dengan menganalisis kondisi ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami proses dan bentuk partisipasi perempuan pada kontestasi politik lokal khususnya di DKI Jakarta, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik, tim pemenangan, dan pemangku kepentingan dalam membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya partisipasi Perempuan dalam proses pemenangan pasangan calon Gubernur Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024?
2. Apa saja bentuk partisipasi perempuan dalam mendukung pemenangan pasangan calon Gubernur Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses terbentuk dan berlangsungnya partisipasi perempuan dalam pemenangan pasangan calon Gubernur Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam mendukung kemenangan pasangan calon Pramono Anung- Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini secara garis besar terbagi atas dua hal, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik dan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai partisipasi politik perempuan dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara motivasi individu, sosialisasi politik keluarga, jaringan sosial, mobilisasi politik, serta bentuk keterlibatan perempuan dalam proses kemenangan pasangan calon. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas partisipasi perempuan, politik lokal, dan mobilisasi pemilih.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dengan menganalisis partisipasi perempuan dalam konteks partisipasi Perempuan dalam kemenangan pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik, tim kemenangan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi partisipasi dan

mobilisasi politik yang lebih inklusif serta dapat memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan yang dibutuhkan perempuan, termasuk akses informasi, pembagian peran, penguatan kapasitas, serta penyediaan ruang partisipasi yang sesuai dengan kondisi sosial perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap pentingnya keterlibatan perempuan sebagai aktor politik, bukan hanya sebagai kelompok pemilih.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dan dipublikasikan dalam bentuk artikel, jurnal, tesis, atau laporan penelitian lainnya. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian baru untuk memperoleh berbagai perbandingan konseptual dan empiris sebagai landasan dalam memperkuat argumentasi penelitian. Dengan demikian, penelitian terdahulu berfungsi untuk mengeksplorasi pentingnya peran perempuan dalam pemilu dan proses politik.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Antik Bintari (2021). Jurnal Keadilan Pemilu. Vol. 2, No. 1, hlm.13–22 https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142	Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu	Menunjukkan bahwa perempuan semakin berpartisipasi sebagai pemilih, penyelenggara, dan calon legislatif, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya dalam memperoleh representasi politik yang setara.	Penelitian Bintari masih memandang perempuan sebagai bagian dari representasi politik dalam pemilu. Belum menjelaskan bagaimana perempuan berperan sebagai aktor strategis yang mengorganisasi, memobilisasi, dan memenangkan pasangan calon dalam Pilkada. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui analisis peran perempuan dalam strategi pemenangan pasangan Pramono Anung–Rano Karno.
2.	Rhizkika Lhena Darwin (2017) Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs. Vol. 39, No. 3, hlm. 532–551. DOI: 10.1355/cs39-3g	The Power of Female Brokers: Local Elections in North Aceh	Menjelaskan bahwa perempuan berperan sebagai broker politik yang efektif melalui jaringan sosial dan kedekatan personal dalam pemilihan kepala daerah di Aceh Utara.	Penelitian Darwin memusatkan perhatian pada fungsi perempuan sebagai broker politik dalam konteks masyarakat Aceh yang dipengaruhi patronase lokal dan budaya keagamaan. Penelitian ini memperluas kajian dengan melihat perempuan tidak hanya sebagai broker, tetapi juga sebagai agen mobilisasi politik dalam konteks perkotaan yang lebih plural, kompetitif, dan berbasis jaringan komunitas di Jakarta.

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
3.	Nisaul Fadhillah (2020) Global Media Journal Australian, Vol. 14, No. 1, hlm. 1–17. https://www.hca.westernsydney.edu.au/gmjau/?p=3898	Female Brokers: Mobilising Voters within Indonesia's Majelis Taklim Network	Menunjukkan bahwa jaringan Majelis Taklim menjadi sarana efektif bagi perempuan untuk memobilisasi dukungan politik melalui hubungan sosial-keagamaan.	Penelitian Fadhillah hanya menyoroti satu jenis jaringan perempuan, yaitu Majelis Taklim. Penelitian ini memperluas analisis dengan mengkaji berbagai jaringan perempuan, seperti PKK, organisasi relawan, komunitas sosial, kelompok profesi, arisan, dan pengajian, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme mobilisasi politik perempuan dalam Pilkada.
4.	Pepy Arianti & M. Fachri Adnan (2024) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol. 4, No. 2 https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1868	Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan	Menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan cukup tinggi sebagai pemilih, tetapi masih dipengaruhi faktor pendidikan, budaya, dan akses informasi politik.	Penelitian Arianti & Adnan berorientasi pada partisipasi perempuan sebagai pemilih dalam Pilpres. Belum mengkaji keterlibatan perempuan dalam organisasi pemenangan, kampanye, koordinasi relawan, maupun mobilisasi suara pada Pilkada. Penelitian ini mengisi aspek tersebut melalui analisis strategi partisipasi perempuan dalam memenangkan pasangan calon gubernur.

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
5.	Susi Widiya Putri & Yulita Nilam Fridiyanti (2024). Resolusi: Jurnal Sosial Politik. Vol. 7, No. 1, hlm. 13–20 https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i1.7531	Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024	Mengidentifikasi peluang dan hambatan partisipasi politik perempuan setelah Pemilu 2024 serta pentingnya penguatan kapasitas politik perempuan.	Penelitian Putri & Fridiyanti berfokus pada evaluasi pasca pemilu sehingga belum menguraikan dinamika keterlibatan perempuan selama proses kontestasi berlangsung. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pemenangan Pilkada, mulai dari pembentukan jaringan, strategi mobilisasi, hingga kontribusi perempuan terhadap kemenangan pasangan Pramono Anung–Rano Karno.
6.	Laila Kholid Alfirdaus & Rosihan Widi Nugroho (2019). <i>Jurnal Politik</i> , Vol. 5, No. 1, Article 3. DOI: 10.7454/jp.v5i1.1020.	Needed but Neglected: Women Activists as Vote Getters in Elections at the Local Level	Studi kasus di Semarang. menunjukkan bahwa aktivis perempuan di tingkat akar rumput dimanfaatkan sebagai <i>vote getters</i> melalui jaringan komunitas seperti PKK dan organisasi pedagang, serta dilibatkan dalam tim sukses dan kampanye. Jaringan perempuan menjadi sumber penting untuk menjangkau pemilih perempuan. Namun, keterlibatan mereka sering terbatas pada mobilisasi suara dan belum selalu diikuti posisi politik yang setara setelah pemilu.	Alfirdaus & Nugroho menekankan perempuan sebagai aktivis akar rumput dan <i>vote getters</i> dalam pemilu lokal. Penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan melihat proses partisipasi perempuan secara berlapis, mulai dari kesadaran politik, dukungan keluarga, jaringan komunitas, mobilisasi, kampanye, hingga partisipasi formal sebagai tim, relawan, dan saksi TPS. Penelitian ini juga melihat perubahan posisi perempuan dari pendukung menjadi mobilisator dan aktor strategis dalam pemenangan pasangan calon gubernur.

No.	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
7.	Wahyu Sitorus & Nurul Nurhandjati (2025). <i>Sospol: Jurnal Sosial Politik</i> , Vol. 11, No. 1, hlm. 43–52. DOI: 10.22219/jurnalsos pol.v11i1.38338.	Strategi Komunitas Juang Perempuan dalam Memenangkan Jhonny Simanjutak pada Pemilihan Legislatif DKI Jakarta 2024	Menunjukkan bahwa Komunitas Juang Perempuan Jakarta Utara berperan strategis dalam memobilisasi dukungan pemilih melalui penguatan kapital sosial, baik di dalam maupun di luar komunitas. Keterlibatan komunitas memperkuat jaringan sosial dan berkontribusi terhadap keberhasilan kandidat dalam kontestasi politik lokal.	Sitorus & Nurhandjati berfokus pada satu komunitas perempuan dan strategi pemenangan seorang calon legislatif pada Pemilu 2024 di DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada Pilkada DKI Jakarta 2024 dan menganalisis partisipasi perempuan melalui berbagai jaringan serta proses yang lebih luas, yaitu kesadaran politik, dukungan keluarga, jaringan komunitas, mobilisasi, dan kampanye sebagai partisipasi formal, sekaligus memetakan perempuan sebagai pendukung, mobilisator, dan aktor strategis.

Isi dari tabel di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia telah berkembang dalam beberapa fokus, yaitu representasi politik perempuan dalam pemilu (Bintari, 2021), perempuan sebagai broker politik dan aktor mobilisasi melalui jaringan sosial maupun keagamaan (Darwin, 2017; Fadhillah, 2020), serta partisipasi perempuan sebagai pemilih dan perkembangan keterlibatan politik perempuan (Arianti & Adnan, 2024; Putri & Fridiyanti, 2024). Selain itu, penelitian Alfirdaus dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa aktivis perempuan di tingkat akar rumput dapat berperan sebagai *vote getters* melalui jaringan komunitas, sedangkan Sitorus dan Nurhandjati (2025) menunjukkan peran

strategis komunitas perempuan dalam mobilisasi dukungan dan strategi pemenangan kandidat pada Pemilu 2024 di DKI Jakarta. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat terlibat dalam jaringan politik, mobilisasi suara, kampanye, dan strategi pemenangan.

Meskipun demikian, terdapat ruang kajian yang masih dapat dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi perempuan sebagai *broker*, *vote getter*, anggota komunitas, maupun bagian dari jaringan pemenangan, tetapi proses terbentuknya partisipasi perempuan dari tahap awal hingga keterlibatan politik yang lebih formal belum dijelaskan secara utuh. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada fungsi atau strategi perempuan dalam mobilisasi, sementara keterkaitan antara kesadaran politik, dukungan keluarga, keterlibatan dalam jaringan komunitas, proses mobilisasi, kampanye, hingga partisipasi formal dalam struktur pemenangan masih perlu dikaji lebih mendalam. Kedua, penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya jaringan sosial dalam mobilisasi politik perempuan, baik melalui Majelis Taklim (Fadhillah, 2020), jaringan aktivis dan komunitas (Alfirdaus & Nugroho, 2019), maupun Komunitas Juang Perempuan (Sitorus & Nurhandjati, 2025). Namun, masih terdapat ruang untuk melihat keterhubungan berbagai jaringan perempuan secara lebih luas dalam satu proses pemenangan, tidak hanya pada satu komunitas atau satu bentuk jaringan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan jaringan, tetapi juga bagaimana jaringan tersebut menjadi ruang pertukaran informasi, pembentukan kepercayaan,

mobilisasi, dan pengorganisasian dukungan politik. Ketiga, penelitian Sitorus dan Nurhandjati (2025) telah memberikan kajian mengenai strategi komunitas perempuan di DKI Jakarta pada Pemilu 2024, tetapi objek penelitiannya adalah kemenangan calon legislatif.

Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Pilkada DKI Jakarta 2024, khususnya keterlibatan perempuan dalam proses kemenangan pasangan calon gubernur Pramono Anung–Rano Karno. Perbedaan konteks kontestasi tersebut penting karena Pilkada memiliki karakteristik kompetisi, struktur kemenangan, dan pola mobilisasi yang berbeda dengan pemilihan legislatif. Berdasarkan ruang kajian tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana proses dan bentuk partisipasi perempuan dalam kemenangan pasangan Pramono Anung–Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Fokus penelitian tidak hanya melihat tingkat partisipasi perempuan, tetapi juga mengkaji bagaimana partisipasi tersebut terbentuk, jaringan yang digunakan, bentuk mobilisasi yang dilakukan, keterlibatan perempuan dalam kampanye, serta kontribusinya dalam proses kemenangan pasangan calon.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang melihat partisipasi perempuan sebagai suatu proses yang berlapis, bukan hanya sebagai hasil atau fungsi mobilisasi. Pertama, penelitian ini menganalisis alur terbentuknya partisipasi perempuan, mulai dari kesadaran politik, dukungan keluarga, keterhubungan dengan jaringan komunitas, mobilisasi politik, keterlibatan dalam kampanye, hingga partisipasi formal sebagai bagian dari tim, relawan, maupun saksi TPS. Kedua, penelitian ini melihat beragam jaringan perempuan dan hubungan

antarjaringan dalam proses mobilisasi, sehingga tidak terbatas pada satu komunitas tertentu. Ketiga, penelitian ini mengkaji keterlibatan perempuan dalam kemenangan pasangan calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024, sekaligus memetakan perbedaan intensitas keterlibatan perempuan sebagai pendukung, mobilisator, dan aktor strategis

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi secara umum didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi mencakup berbagai aktivitas mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum, terlibat dalam organisasi sosial dan politik, hingga mengambil bagian dalam forum diskusi publik. Esensi dari partisipasi adalah bahwa individu memiliki suara dan peran dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada mereka. Teori partisipasi politik menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena secara langsung mendefinisikan konsep yang menjadi fokus kajian.

Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara sipil yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Mereka menegaskan bahwa partisipasi politik bersifat sukarela, artinya tidak termasuk aktivitas yang dilakukan atas paksaan atau mobilisasi dari

pihak penguasa semata, melainkan tindakan yang didasari oleh kehendak bebas warga. Sementara itu, Miriam Budiardjo (2008) mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik ke dalam dua kategori utama. Pertama, partisipasi konvensional yang mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam kampanye, kontak dengan pejabat pemerintah, dan kegiatan organisasi. Kedua, partisipasi non-konvensional yang mencakup petisi, demonstrasi, hingga kekerasan politik. Dalam konteks penelitian ini, perempuan yang terlibat dalam tim kemenangan, kampanye akar rumput, dan mobilisasi komunitas termasuk dalam kategori partisipasi konvensional yang paling aktif.

Milbrath (1965) lebih lanjut membagi intensitas keterlibatan warga dalam politik ke dalam tiga tingkatan hierarkis. Tingkatan tertinggi adalah *gladiators*, yaitu mereka yang terlibat sangat aktif dalam semua aspek kegiatan politik seperti menjadi kandidat, koordinator kampanye, dan pemimpin partai. Tingkatan menengah adalah *transitionals* atau *participants*, yaitu mereka yang terlibat secara aktif namun tidak di posisi paling tinggi, seperti relawan aktif dan anggota tim kemenangan. Tingkatan paling dasar adalah *spectators*, yaitu mereka yang hanya memberikan suara dan mengikuti informasi politik tanpa terlibat lebih jauh. Hierarki ini relevan untuk memetakan posisi ketiga kelompok informan dalam penelitian ini.

1.6.2 Sosialisasi Politik Keluarga

Teori sosialisasi politik menjelaskan proses di mana individu mempelajari, menginternalisasi, dan mengembangkan nilai-nilai, sikap, serta orientasi politiknya melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Herbert Hyman (1959) yang pertama kali memperkenalkan konsep ini menegaskan bahwa sosialisasi politik bukanlah proses alamiah, melainkan hasil dari pengaruh berkelanjutan dari agen-agen sosial yang ada di sekitar individu sepanjang hidupnya. Dawson dan Prewitt (1969) mengidentifikasi keluarga sebagai agen sosialisasi politik yang paling pertama dan paling berpengaruh. Mereka menjelaskan bahwa keluarga memengaruhi partisipasi politik seseorang melalui tiga mekanisme utama. Pertama, transmisi langsung nilai-nilai politik, di mana orang tua yang aktif berpolitik cenderung melahirkan anak yang juga memiliki minat dan kesadaran politik yang tinggi. Kedua, iklim diskusi politik dalam rumah tangga, di mana keluarga yang terbiasa mendiskusikan isu-isu politik menciptakan lingkungan yang mendorong anggotanya untuk peduli dan aktif. Ketiga, dukungan atau tekanan terhadap partisipasi, di mana sikap keluarga terhadap keterlibatan anggotanya dalam politik secara langsung memengaruhi keberanian individu untuk berpartisipasi.

Greenstein (1965) menambahkan bahwa sosialisasi politik tidak hanya berlangsung dalam keluarga, tetapi juga melalui agen-agen sekunder seperti kelompok teman sebaya, lingkungan komunitas,

organisasi kemasyarakatan, dan media. Dalam konteks partisipasi perempuan, teori ini sangat relevan karena menjelaskan mengapa sebagian perempuan berani aktif berpolitik sementara yang lain tidak dan jawabannya sebagian besar terletak pada bagaimana proses sosialisasi politik yang mereka alami dalam keluarga dan komunitasnya. Teori ini juga menjelaskan mengapa jaringan komunitas seperti PKK, pengajian, dan arisan menjadi saluran yang efektif karena di dalam komunitas-komunitas tersebut terjadi proses sosialisasi politik informal yang membangun kesadaran dan keberanian perempuan untuk berpartisipasi.

1.6.3 Mobilisasi Politik

Mobilisasi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok diorganisir dan dipanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau politik. Mobilisasi mencakup penyebaran informasi, penggalangan dukungan, dan penggerakan orang untuk terlibat dalam aksi yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau mengambil keputusan kolektif. Dalam konteks sosial, mobilisasi dapat terjadi untuk berbagai tujuan, seperti gerakan sosial, kampanye politik, atau aksi kolektif lainnya. Teori mobilisasi politik menjelaskan bagaimana individu dan kelompok digerakkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Rosenstone dan Hansen (1993) berargumen bahwa partisipasi politik tidak semata-mata dihasilkan dari kesadaran individu, melainkan juga sangat ditentukan oleh upaya

mobilisasi yang dilakukan oleh kandidat, partai politik, atau aktor jaringan sosial. Mereka menegaskan bahwa orang-orang lebih mungkin berpartisipasi ketika ada pihak lain yang secara aktif mengajak dan memberikan alasan yang relevan untuk terlibat.

Dalam konteks kemenangan Pilkada, perempuan yang menjadi koordinator dan relawan berperan sebagai agen mobilisasi yang menggerakkan pemilih perempuan lain di lingkungannya. Efektivitas mobilisasi ini sangat bergantung pada kualitas jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya, karena kepercayaan yang ada dalam jaringan tersebut membuat pesan kampanye lebih mudah diterima.

Robert Putnam (2000) melengkapi teori mobilisasi dengan konsep modal sosial yang didefinisikan sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Putnam membedakan dua jenis modal sosial: *bridging social capital* yang menghubungkan individu dari kelompok berbeda, dan *bonding social capital* yang memperkuat ikatan dalam kelompok yang sama. Dalam penelitian ini, komunitas perempuan seperti PKK, arisan, dan pengajian merupakan wujud *bonding social capital* yang menjadi infrastruktur informal kemenangan. Kepercayaan yang sudah terbangun dalam komunitas-komunitas tersebut menjadikan proses mobilisasi berjalan lebih organik dan efektif dibandingkan kampanye formal.

Teori mobilisasi politik mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Strategi Mobilisasi

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan mobilisasi bergantung pada strategi yang digunakan. Dalam penelitian ini, akan dikaji berbagai strategi kampanye yang diterapkan oleh Pramono Anung - Rano Karno, termasuk metode komunikasi yang efektif seperti penggunaan media sosial, pengorganisasian acara komunitas, dan dialog langsung yang melibatkan perempuan. Pemilihan target audiens yang tepat sangat penting. Penelitian ini akan meneliti bagaimana kampanye berfokus pada kelompok perempuan berdasarkan demografi, seperti usia, pendidikan, dan latar belakang sosial. Selain itu, menciptakan ikatan sosial yang kuat antara anggota kelompok, seperti melalui kelompok pendukung perempuan, dapat meningkatkan solidaritas dan mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

2. Faktor Pengaruh

Dalam kajian ini, sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan mobilisasi perempuan dalam pemilu akan diidentifikasi. Konteks sosial di DKI Jakarta, yang mencakup norma-norma budaya dan nilai-nilai gender, akan dianalisis untuk memahami bagaimana hal ini dapat berpengaruh terhadap

partisipasi perempuan. Dukungan institusi, seperti partai politik dan organisasi masyarakat, akan menjadi kunci dalam meningkatkan kehadiran perempuan dalam pemilu. Selain itu, tingkat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada juga dapat menjadi pendorong untuk mobilisasi, di mana perempuan yang merasa tidak terwakili dalam kebijakan publik mungkin lebih terdorong untuk terlibat dalam proses pemilu.

3. Dampak Mobilisasi

Mobilisasi yang efektif diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada partisipasi politik perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah upaya mobilisasi tersebut berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap legitimasi tindakan pemerintahan. Dampak dari partisipasi perempuan dalam pemilu tidak hanya akan terlihat pada hasil pemilihan, tetapi juga dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Analisis dampak mobilisasi akan mencakup sejauh mana suara perempuan diakui dan diterima dalam proses pengambilan keputusan serta perubahan perilaku politik di kalangan perempuan setelah pemilihan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasional Konsep

No.	Indikator	Definisi Konseptual	Dimensi	Landasan Teori
1.	Motivasi dan Kesadaran Berpartisipasi	Dorongan internal maupun eksternal yang mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon.	a. Motivasi ideologis/program kandidat. b. Motivasi jaringan dan organisasi c. Kesadaran politik sebagai warga negara	Huntington & Nelson (1976); Budiardjo (2008)
2.	Intensitas dan Tingkat Kepercayaan	Seberapa dalam dan seberapa aktif keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pemenangan, dari inti hingga pendukung.	a. Gladiators: koordinator dan pengambil keputusan b. Participants: relawan dan kader aktif c. Spectators: pemilih dan pendukung pasif	Milbrath (1965)
3.	Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Sosial	Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membentuk kesadaran dan keberanian perempuan untuk berpartisipasi dalam politik	a. Dukungan atau tekanan dari suami/keluarga b. Iklim diskusi politik dalam rumah tangga c. Pengaruh tokoh komunitas dan teman sebaya.	Dawson & Prewitt (1969); Greenstein (1965)
4.	Hambatan dalam Berpartisipasi	Berbagai rintangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan peran aktifnya dalam pemenangan, baik dari dalam maupun luar.	a) Hambatan struktural: akses sumber daya b) Hambatan kultural: stigma dan stereotip gender c) Hambatan situasional: beban domestik dan beban	Dawson & Prewitt (1969); Greenstein (1965)

No.	Indikator	Definisi Konseptual	Dimensi	Landasan Teori
			ganda (double burden)	
5.	Strategi Mobilisasi melalui Jaringan Komunitas	Cara-cara yang digunakan perempuan untuk menggerakkan dukungan melalui jaringan sosial yang sudah ada di komunitas.	a. Mobilisasi melalui forum PKK, arisan, pengajian b. Kampanye door-to-door berbasis kepercayaan c. Pemanfaatan media sosial untuk penyebaran pesan	Rosenstone & Hansen (1993); Putnam (2000)
6.	Bentuk Partisipasi Elektoral dan Non-Elektoral	Spektrum bentuk keterlibatan perempuan dalam pemenangan, mulai dari yang paling formal hingga yang paling informal.	a. Keterlibatan dalam struktur formal tim pemenangan b. Kampanye langsung dan sosialisasi komunitas c. Kampanye digital di media sosial d. Pengawasan dan saksi di TPS	Rosenstone & Hansen (1993); Putnam (2000)

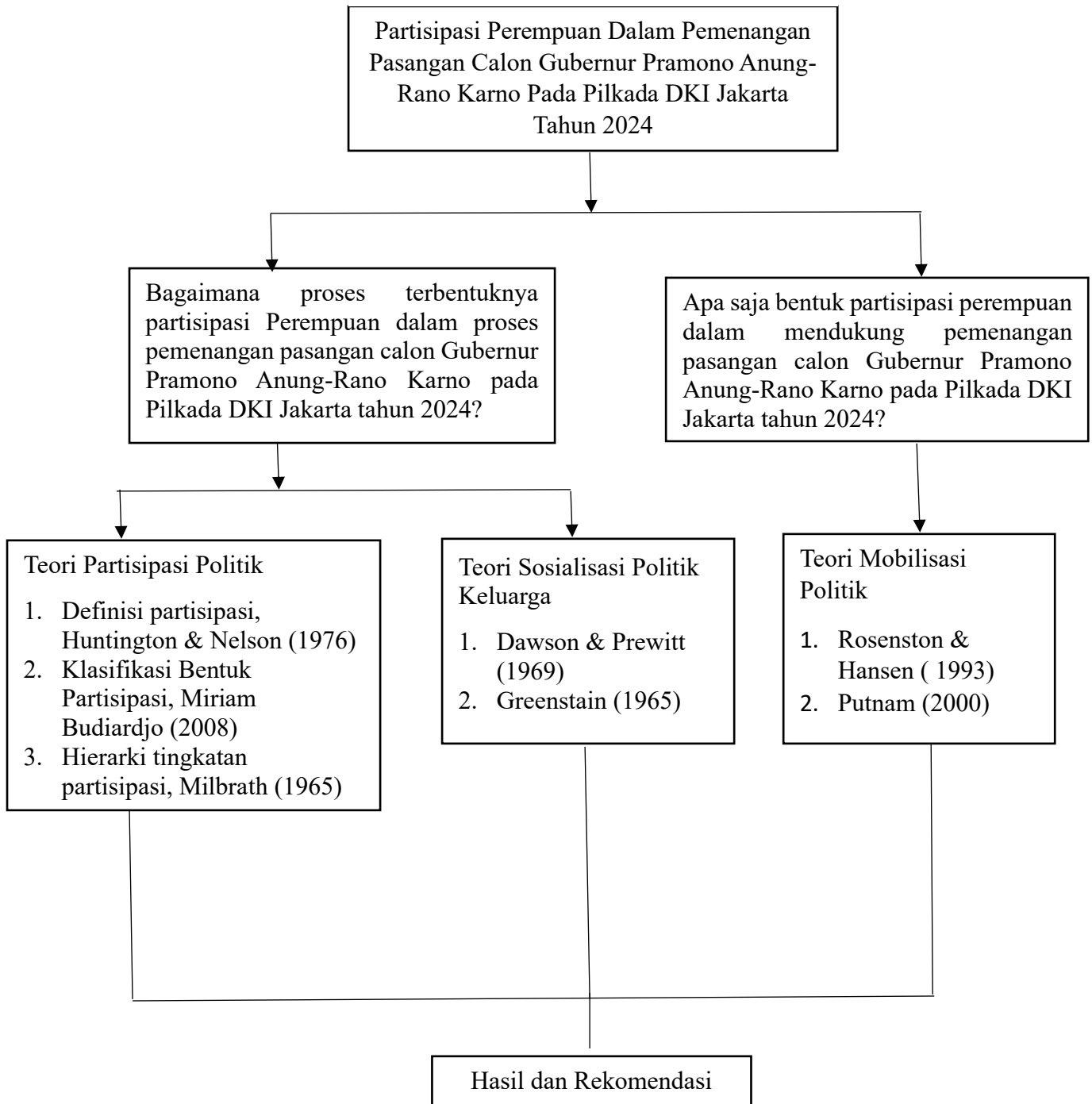
1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bangunan konseptual yang menggambarkan alur logika penelitian secara sistematis, mulai dari konteks permasalahan hingga kesimpulan yang diharapkan. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang menghubungkan antara teori-teori yang digunakan dengan rumusan masalah dan indikator penelitian. Penelitian ini berangkat dari konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan perolehan 50,07 persen suara. Kemenangan yang tipis ini menjadikan setiap kelompok pemilih berperan

krusial, termasuk pemilih perempuan yang jumlahnya lebih besar dari pemilih laki-laki dalam DPT. Teori partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1976; Budiardjo, 2008; Milbrath, 1965) digunakan sebagai *grand theory* yang menjadi payung utama dan fondasi keseluruhan analisis dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan partisipasi politik, mengklasifikasikan bentuk-bentuknya, serta mengukur hierarki intensitas keterlibatan perempuan secara menyeluruh. Dari *grand theory* ini, diturunkan dua *middle range theory* yang lebih spesifik sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Pertama, teori sosialisasi politik (Dawson & Prewitt, 1969; Greenstein, 1965) digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah 1, yaitu bagaimana latar belakang sosialisasi dalam keluarga dan komunitas membentuk motivasi, intensitas, serta hambatan perempuan dalam berpartisipasi. Kedua, teori mobilisasi politik (Rosenstone & Hansen, 1993; Putnam, 2000) digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah 2, yaitu apa saja bentuk-bentuk konkret partisipasi perempuan, dengan menekankan peran modal sosial komunitas sebagai infrastruktur mobilisasi dalam proses pemenangan. Dengan demikian, ketiga teori ini secara bersama-sama membentuk kerangka analisis yang utuh untuk menggambarkan partisipasi perempuan dari bentuk motivasi, intensitas, hingga bentuk konkret keterlibatannya dalam konteks kemenangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi perempuan dalam kemenangan Pramono Anung-Rano Karno melalui pengalaman, persepsi, dan pemaknaan para pelakunya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali narasi yang kaya, kontekstual, dan tidak dapat diungkap melalui data numerik semata. Creswell (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian menganalisis data secara induktif untuk menemukan pola dan tema yang muncul dari data itu sendiri.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang bagaimana partisipasi perempuan berlangsung dan apa saja bentuk-

bentuk konkretnya dalam kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2024. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan metode seperti wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini nantinya terdiri dari deskripsi naratif yang lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti dan menggambarkan sudut pandang subjek penelitian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan lokasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi langsung antara topik penelitian dengan kondisi geografis partisipasi perempuan dalam pemilu di daerah urban yang memiliki keragaman sosial dan politik. Penelitian dilakukan di wilayah administratif Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, meliputi sekretariat partai dari tim kemenangan pasangan calon, komunitas perempuan yang aktif berpartisipasi dalam politik, serta sumber informasi masyarakat pemilih di wilayah DKI Jakarta.

1.9.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, dan wawasan yang penting bagi penelitian yang sedang peneliti lakukan sesuai dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Para informan ini berperan sebagai sumber utama di mana mereka dapat memberikan perspektif dan pengalaman subjektif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, peran informan sangat krusial karena data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat faktual tetapi juga mencerminkan emosi, motivasi, dan konteks sosial yang menciptakan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu yang dianalisis. Informan dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik dan benar memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan berupa perempuan yang terlibat dalam kampanye, seperti pemilih perempuan serta tokoh masyarakat yang memahami partisipasi perempuan dalam kontestasi politik. Penggunaan berbagai informan dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda dapat membantu peneliti memahami kompleksitas fenomena yang akan diteliti karena keberagaman informan berkontribusi pada pengambilan data yang lebih komprehensif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif (Yin, 2014).

Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Yusriah Dzinnun	Komisaris PT Transjakarta/ ex Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sebagai Koordinator/ Relawan Perempuan Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno tingkat Provinsi DKI Jakarta
2.	Marianne Suhita Dewi	Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta/ Anggota Perempuan Partai Pendukung Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3.	Lestari Manurung	Wakil Sekretaris Jendral Bidang Luar Negeri DPP Partai Hanura dan Bendahara Umum DPD Partai Hanura/Anggota Perempuan Partai Pendukung Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno (Partai Hati Nurani Rakyat)
4.	Tanti Rista Solihat	Kader PKK Jumantik/ Masyarakat Perempuan Jakarta Pusat yang aktif dan memilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
5.	Mega	Kader PKK Dasawisma/ Masyarakat Perempuan Jakarta Pusat yang aktif dan memilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
6.	Siti Muchlisoh	Wakil Ketua PKK/ Masyarakat Perempuan Pulau Untung Jawa,

No.	Informan	Jabatan
		Kepulauan Seribu yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
7.	Dhiny Chayadewi	Sekretaris PKK/ Masyarakat Perempuan Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
8.	Djumirah	Kader PKK Jumantik/ Masyarakat Perempuan Jakarta Barat yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
9.	Yayat Kusmiyati	PKK Poktan/Masyarakat Perempuan Jakarta Barat yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
10.	Mimin Sumaini	PKK Dasawisma/Masyarakat Perempuan Jakarta Selatan yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
11.	Idah	Ibu Ketua RT Jagakarsa Masyarakat Perempuan Jakarta Selatan yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
12.	Mustia	Bendahara RT Kec. Ciracas/Masyarakat Perempuan Jakarta Timur yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno

No.	Informan	Jabatan
13.	Ucu Rosita	Masyarakat Perempuan Jakarta Timur yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
14.	Afnita	Masyarakat Perempuan Jakarta Utara yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno
15.	Dewi Nugrahini	Masyarakat Perempuan Jakarta Utara yang aktif dan pemilih Pasangan Calon Pramono Anung- Rano Karno

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan data dalam bentuk kalimat tertulis, teks, frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan orang, lingkungan, tindakan, serta peristiwa pada suatu fenomena sosial. Adapun sumber data dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang relevan dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan hasil data yang diperoleh secara tidak langsung dengan permasalahan yang dikaji yaitu dengan melalui studi kepustakaan

seperti buku, jurnal, artikel, berita media cetak atau media online, pengumpulan dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta laporan yang berkaitan dengan partisipasi Perempuan dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penelitian adalah tentang bagaimana peneliti dapat mengumpulkan data, karena data yang dikumpulkan akan menentukan sejauh mana keabsahan serta validitas tulisan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang umum digunakan pada pengumpulan data kualitatif. Beberapa teknik tersebut adalah:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi atau tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dijadikan informan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, motivasi dan hambatan perempuan dalam berpartisipasi pada kemenangan pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno. Setiap wawancara direkam serta dicatat dan keterangan yang didapat dari narasumber digunakan sebagai bahan data untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, melalui WhatsApp, dan daring menggunakan *platform* Zoom Meeting

mengingat beberapa kondisi yang kurang memungkinkan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan enam indikator penelitian yang telah ditetapkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui sumber lain yang relevan dengan penelitian. Beberapa cara yang dilakukan antara lain dengan mendokumentasikan berkas-berkas atau data-data pendukung resmi, rekaman kegiatan kampanye, berita media, dan arsip organisasi yang relevan dengan partisipasi Perempuan dalam pemenangan pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan peneliti untuk penelaahan terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian dan analisis terhadap sumber-sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik, sosialisasi politik, mobilisasi pemilih, dan dinamika pemilu di Indonesia.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994). Model ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif

yang digunakan dan memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berinteraksi, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti merangkum data wawancara, memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, dan membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang paling penting dan bermakna sesuai dengan indikator penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu data yang sudah direduksi lalu disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan yang memudahkan pembacaan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan tema yang muncul dari data secara lebih terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap terakhir adalah di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil

temuan dengan teori yang digunakan dan melakukan *member checking* dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual, yang sangat penting untuk mendukung rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada partisipasi perempuan dalam kontestasi politik.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Dalam penelitian kualitatif, validitas dimaknai sebagai upaya untuk memeriksa akurasi hasil penelitian melalui rangkaian penerapan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2009). Untuk mencapai suatu data yang valid dan sesuai, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi data atau teknik untuk memeriksa data-data agar terbukti keabsahannya dengan melakukan perbandingan dan mengecek silang informasi yang diperoleh dari ketiga kategori informan yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung pada indikator yang sama untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data.

Setelah itu peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari teknik yang berbeda untuk topik yang sama, yaitu antara data wawancara, data pendukung, dan dokumentasi, guna memverifikasi kesamaan informasi dan meminimalisir bias. Selain triangulasi, peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi dan temuan sementara kepada informan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa peneliti memahami pernyataan informan dengan tepat dan tidak terjadi kesalahan pemaknaan.

Kualitas data dalam penelitian ini akan terjamin melalui pendekatan yang sistematis dan reflektif, sehingga memberikan data yang solid untuk analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan terkait partisipasi perempuan dalam politik. Temuan yang dihasilkan dari upaya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran perempuan dalam proses partisipasi dan pengambilan keputusan pada ranah politik di Indonesia, khususnya pada level daerah lokal seperti di DKI Jakarta.